



KR-Toto Rusmanto

Pelaksanaan Pelatihan Konvensi Hak Anak di Purbalingga.

PELATIHAN KONVENSI HAK ANAK Purbalingga Siap Penuhi Hak Dasar

PURBALINGGA (KR) - Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KBP3A) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak, Selasa-Rabu (21-22/1) di Ruang Ardilawet gedung setda setempat. Pelatihan meliputi gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).

"Pelatihan ini untuk memastikan anak hidup dengan hak dasarnya secara baik," kata Plt Kepala Dinsosdalduk KBP3A Kabupaten Purbalingga, Agung Widiarto. Melalui pelatihan, diharapkan para *stakeholders* memahami secara mendalam tentang Konvensi Hak Anak sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Purbalingga Layak Anak.

Agung menambahkan, saat ini kabupaten Purbalingga meraih predikat Madya Kabupaten Layak Anak. Pemkab menargetkan naik kelas menjadi kategori Nindya. "Karena itu, perlu dukungan dan sinergitas banyak pihak untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang benar-benar layak bagi para anak," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Yuli Sulistyanto, pelatih Konvensi Hak Anak dari Yayasan Setara Semarang, merinci sejumlah prinsip umum hak anak. Yakni kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan dan kelangsungan hidup, partisipasi anak, serta nondiskriminasi. Untuk itu, negara harus selalu hadir dalam pelaksanaan hak-hak anak dengan berbagai tugasnya. "Tugas dimaksud adalah, *to respect* (menghargai), *to fulfill* (memenuhi kebutuhannya), *to protect*, (melindungi), dan *to promote* (mendorong)," jelasnya. (Rus)-f

UMK NAIK 6,5 PERSEN MULAI JANUARI Banyumas Sosialisasi ke Pengusaha

BANYUMAS (KR) - Sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Banyumas, resmi mengalami kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025. Kenaikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinakerop UKM Banyumas mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha.

Sosialisasi dilaksanakan di aula Kelurahan Sokanegara, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan UMK berjalan sesuai regulasi.

Kepala Dinakerop UKM Banyumas, Wahyu Dewanto mengatakan bahwa UMK Banyumas tahun 2025 naik sebesar Rp 142.720 atau 6,5 persen, dari Rp 2.195.690 menjadi Rp 2.338.410. "Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendukung dinamika ekonomi di Banyumas," ungkapnya, Kamis (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga mengungkapkan hasil monitoring UMK tahun 2024. Dari 120 perusahaan yang disurvei, 92 perusahaan (76,7 persen) telah mematuhi ketentuan UMK. Sementara itu 28 perusahaan lainnya belum mampu memenuhi aturan tersebut. "Kami terus berupaya agar semua perusahaan dapat mematuhi ketentuan ini demi keseimbangan ekonomi daerah," jelasnya. (Dri)-f

SAPI TEMUAN DKPPP TEMANGGUNG Sapi Kandang Komunal Terpapar PMK



KR-Zaini Arrosyid

Petugas DKPPP Temanggung sedang mengobati sapi yang terpapar PMK.

TEMANGGUNG (KR) - Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Temanggung menemukan populasi sapi di kandang komunal suspek terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK). Kepala UPTD Puskesmas dan BIB, DKPPP Temanggung, Nurul Khasanah mengatakan temuan suspek PMK dalam satu kandang diketahui ketika melakukan skrining kesehatan terhadap hewan ternak sebelum melakukan vaksinasi.

"Secara klinis kita temukan ada enam ekor sapi positif terpapar PMK dari 20 ekor yang ada. Tetapi dugaan semua ternak terpapar PMK," jelas Nurul, Kamis (23/1). Menurutnya, temuan PMK itu dapat dilihat dari fisik sapi yang mengalami demam, pincang karena mengalami luka pada kuku kaki, serta mengeluarkan banyak air liur.

Dikatakan, petugas memberikan penanganan dengan penyuntikkan vitamin, antibiotik dan vaksinasi. Sedangkan pada pemilih dianjurkan untuk tidak mengeluarkan maupun memasukkan sapi lainnya ke kandang tersebut agar tidak terjadi penularan. Antisipasi yang dilakukan petugas adalah pengobatan guna mengendalikan penyakit, dan untuk sementara melarang mengeluarkan ternak dari sini ataupun memasukkannya.

"Ternak yang sakit ada yang diobati dulu sampai sembuh, dan baru bisa keluar kalau sudah sembuh," ungkap Nurul. Selain vaksinasi, upaya antisipasi lain yang dilakukan DKPPP Temanggung adalah memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada para pedagang dan peternak. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya PMK dan cara pencegahannya, agar penularan penyakit ini dapat dikendalikan. (Osy)-f

HARAPAN YUNI KEPADA BUPATI TERPILIH

'Smooth' Menuju Sragen Lebih Maju

SRAGEN (KR) - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati berharap pergantian pemimpin di kabupaten tersebut *smooth*. Di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari, Yuni titip Sragen kepada pasangan Sigit Pamungkas-Suroto yang sebentar lagi akan dilantik.

Yuni berharap Sigit-Suroto bisa segera merealisasikan visi, misi, dan programnya demi Sragen yang lebih maju. Harapan itu disampaikan dalam konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen 2026 yang digelar di Aula Lantai IV Kantor Pemda Terpadu beberapa waktu lalu. "Mudah-mudahan suksesi pemimpin di Sragen berjalan *smooth*. Semua demi Sragen yang lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Yuni menyampaikan lima harapan, di antaranya terkait penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Yuni berharap angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka semakin menurun melalui berbagai program yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Kemudian program Sekolah Dasar Negeri (SDN) unggul tetap dijalankan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sekolah negeri.

Yuni juga berharap ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta pusat-pusat kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pasar dalam kondisi baik dan tertata secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Harapan keempat Yuni, supaya Pemda terpadu dan gedung-gedung pemerintah yang terbangun bagus semakin meningkatkan semangat pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kelima, kami menaruh harapan sejumlah prestasi yang diraih Sragen menjadi tradisi bagi Sragen ke depan dan dapat menarik dana pembangunan dari

dana insentif pusat," tandas Yuni.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto mengungkapkan, penyusunan prioritas daerah pada 2026 didasarkan pada arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional 2026; arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026; prioritas daerah 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026; rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029; hasil evaluasi kinerja RKPD 2024; serta visi, misi,

dan program strategis Bupati-Wakil Bupati terpilih.

Tema yang diambil dalam pembangunan Sragen 2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Sragen yang Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya. Pada periode lima tahun pertama (2025-2029), dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diarahkan pada penguatan pondasi Sragen yang berdaya saing, maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan.

"Penguatan itu dilakukan dengan penguatan kualitas sumber daya ma-

nusia (SDM) yang berbudaya dan berkarakter, perekonomian yang tangguh, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel disertai kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan," jelas Hargiyanto.

Dia menyebut ada delapan prioritas di 2026 yang didasarkan pada kajian potensi permasalahan daerah. Delapan prioritas tersebut terdiri atas perwujudan kemandirian ekonomi daerah; perwujudan layanan investasi yang berkualitas; perwujudan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas. perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah; pemantapan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat; pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; perwujudan ketahanan pangan masyarakat; dan perwujudan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Sam)-f



KR-Said Masykuri

Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama jurnalis yang bertugas di Sragen.

TIDAK ADA MASALAH DALAM PILKADA 2024

Bupati Pati Bisa Dilantik 6 Febuari

PATI (KR) - Bupati dan Wakil Bupati Pati hasil Pilkada 2024, Sudewo/Risma Adhi Chandra, berpotensi dilantik menjadi bupati definitif pada 6 Febuari 2025. "Peluang tersebut mengacu hasil rapat Komisi II DPR RI yang menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik secara serentak oleh presiden pada 6 Februari 2025," kata Koordinator LSM Dewan Kota Drs H Pramudya Budi, Rabu (22/1).

Menurutnya, secara administratif kemenangan paslon Sudewo/Risma Adhi Chandra sebagai calon bupati/wakil bupati Pati sudah sah, karena sudah ditetapkan dalam pleno KPUD Pati dan dibahas rapat paripurna DPRD Pati. Pada pilkada Pati 2024,

paslon Sudewo/Risma Adhi Chandra yang diusung Partai Gerindra, PKB, PG dan Nasdem, mengalahkan dua pesaingnya.

Yakni Wahyu/Suharyono (PDIP, PD, PKS), serta Budiyono/Novi EY (PPP dan PAN). "Paslon Sudewo/Risma Adhi Chandra sa-

ngat berpeluang dilantik, 6 Februari mendatang" tandas Pramudya.

Sebelumnya, ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan setuju paslon Kepala Daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK, dilantik oleh Presiden

Prabowo Subiyanto secara serentak pada 6 Febuari 2025.

"Pelantikan oleh presiden itu untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota. DPR RI setuju," katanya.

Saat membacakan pokok kesimpulan usai rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu soal jadwal pelantikan kepala daerah, Rabu (22/1), Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, kepala daerah tidak bersengketa yang akan dilantik

presiden itu sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU daerah dan sudah diusulkan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota untuk dilantik.

"Seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa akan dilantik presiden di Jakarta yang saat ini masih berstatus sebagai Ibukota Negara, kecuali untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memiliki peraturan perundang-undangan khusus," jelas Rifqinizamy. (Cuk)-f

HPP GABAH 2025 JADI RP 6.500 PERKILOGRAM

Petani Berharap Dapat Direalisasikan

SUKOHARJO (KR) - Petani di Kabupaten Sukoharjo berharap penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tahun 2025 sebesar Rp 6.500 perkilogram bisa direalisasikan pada panen padi musim tanam I (MT I). Petani juga berharap serapan gabah hasil panen petani lebih cepat dengan melibatkan Bulog. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup petani sekaligus merealisasikan swasembada pangan pemerintah.

Ketua Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Dam Colo Timur, Jigong Sarjanto, mengatakan, pemerintah sudah menetapkan HPP gabah tahun 2025 sebesar Rp 6.500 per kilogram. "Harga tersebut mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2024 lalu. Penetapan HPP

sudah disosialisasikan ke petani," jelasnya, Kamis (23/1).

Ia memperkirakan panen MPT I akan dilakukan petani pada periode Februari, Maret dan April mendatang. Pada bulan-bulan tersebut bersamaan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri, saat kebutuhan bahan pokok pangan sangat tinggi. Karena itu, HPP baru yang telah ditetapkan pemerintah harus segera diterapkan. "Jangan sampai harga gabah petani anjlok, jauh dari HPP yang sudah ditetapkan. Kalau memang nanti harga gabah bisa lebih tinggi dari HPP, itu lebih menguntungkan petani," tegas Jigong.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windarjano mengatakan pemerintah sudah menetapkan

HPP gabah tahun 2025 sebesar Rp 6.500 perkilogram. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. "Kami memastikan, penerapan HPP gabah tahun 2025 sebesar Rp 6.500 sudah diketahui petani. Karena itu petani harus tenang, mengingat penyerapan gabah hasil panen sudah dilindungi pemerintah," tegasnya.

Menurut Jigong, sebelumnya P3A Dam Colo Timur minta kepada pemerintah memberi perlindungan harga gabah panen padi petani. Pemerintah diminta menurunkan Bulog ke sawah saat petani panen padi, dan melakukan penyerapan



KR-Wahyu Imam Ibad

Petani Sukoharjo sedang menanam padi Musim Tanam.

atau pembelian gabah sesuai standar ketentuan HPP tahun 2025. "Bulog jelas harus segera turun saat petani panen padi sehingga gabah bisa langsung segera diserap sesuai HPP tahun 2025 sebesar Rp 6.500 perkilogram," ungkapnya.

P3A Dam Colo Timur juga sudah memberikan sosialisasi kepada petani

untuk menjaga HPP gabah tahun 2025. Petani hanya akan menjual gabah hasil panen sesuai HPP. "Terendah bisa sesuai HPP. Di saat panen raya, kualitas dan kuantitas padi panen petani Sukoharjo tidak sampai turun. "Kalau bisa, jumlah panen lebih banyak dan harga lebih tinggi," pungkas Jigong. (Mam)-f

AKBP Hadi Kristanto Resmi Menjadi Kapolres Karanganyar

KARANGANYAR (KR) - Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto minta dukungan semua anggota Polres agar dapat bersinergi bersama dalam melaksanakan tugas. Untuk itu pihaknya segera melakukan komunikasi internal guna memetakan berbagai hal yang akan dikerjakan.

"Saya mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian supaya saya dapat melanjutkan dan menguatkan apa yang sudah pendahulu saya kerjakan," kata AKBP Hadi Kristanto di sela serah-terima jabatan Kapolres Karanganyar di Mapolres

setempat, Jumat (24/1). AKBP Hadi Kristanto menjabat Kapolres Karanganyar menggantikan pejabat lama AKBP Jerrold HY Kumontoy yang ditarik ke Polda Jateng se-

bagai Kepala Bagian Pembinaan Karir (Kababinkar) Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebelumnya, AKBP Hadi Kristanto menjabat Kasubdit Ranmor Ditres-



KR-Abdul Alim

Tradisi Pedang Pora untuk menyambut Kapolres Karanganyar yang baru.

krim Polda Metro Jaya (PMJ). Penunjukan AKBP Hadi Kristanto sebagai Kapolres Karanganyar berdasar Surat Telegram Rahasias Kapolri nomor ST/2776/XII/KEP/2024 tanggal 29 Desember 2024.

Di tempat yang sama, Kapolres Karanganyar sebelumnya, AKBP Jerrold Hendra Yosef Kumontoy berpesona kepada seluruh anggota Polres Karanganyar agar tetap berkomitmen menjaga nama baik institusi Polri. Ia melanjutkan karimnya di institusi Polri dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Pembinaan Karir (Kababinkar) Biro Sumber Daya

Manusia (SDM) Polda Jawa Tengah (Jateng). "Saya mohon maaf apabila selama memimpin dan berinteraksi ada hal-hal yang tidak berkenan baik perkataan maupun perbuatan," ungkapnya.

Kedatangan pejabat baru Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto disambut dengan tradisi Pedang Pora di lingkungan Polres Karanganyar. Didampingi istri, Kapolres Karanganyar melewati pedang bersilang yang dibuka secara perlahan oleh barisan perwira, untuk membukakan jalan memasuki halaman Polres Karanganyar. (Lim)-f